

**DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PEMALSUANA KTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

INTISARI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana



NAMA : Earil Galuh Riwu

NIM 21310197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2025**

PENGESAHAN

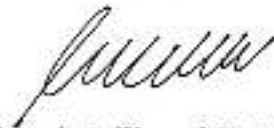
Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Soleman Kette, S.H., M. Hum.
NUPTK : 9152739640130060

Pembimbing II



Jeremia A. Wewo, S.H., M.H.
NUPTK : 6137770671130340

Mengesahkan

Rector
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Prof. Dr. Ir. Gailig Frederik Nounufa, M.T
NUPTK : 3449746647130090

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Yanto Melkianus P. Ron, S.H., M.Hum
NUPTK : 7862752653130070



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677 Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Jumat tanggal 17 (Tujuh belas) bulan Januari tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) telah diselesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : Earil Galuh Riwu

Nim : 21310197

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Soleman Kette, S.H., M.Hum

2. Jeremia A. Wewo, S.H., M.H.

3. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

TANDA TANGAN

Kupang, 17 Januari 2025



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum

NIP/K : 7862752653130070

INTISARI

Judul skripsi ini adalah “deskripsi tentang penyelesaian tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah” masalah dalam penelitian: Mengapa Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku dalam kasus pemalsuan akta Pelepasan Hak Atas Tanah? Apa yang menjadi alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus pemalsuan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah ? tujuan penulis dalam meneliti permasalahan adalah untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta Pelepasan Hak Atas Tanah dan Untuk mengetahui alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta Pelepasan Hak Atas Tanah. Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang: Alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan dan alasan hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan mahkamah Agung dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah. Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan Kesimpulan penulis, Alasan Hakim Pengadilan Negeri: Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta tidak memenuhi unsur-unsur dari dakwaan. Alasan Hakim Peninjauan kembali. -Adanya keadaan Baru (novum) berupa putusan mahkamah Agung Republik Indonesia No:1250.K/Pid/2014. Alasan Hakim Kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan karena: Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan Hakim Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan. Adapun saran yang dapat disampaikan dari penulis ini sebagai berikut : Diharapkan agar dilakukan sosialisasi yang berupa edukasi atau pembelajaran kepada masyarakat tentang proses penerbitan akta sehingga tidak menimbulkan kerugian dan terjadinya penipuan terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan akta yang ada, Bagi penegak Hukum diharapkan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak atas tanah dimasa yang akan datang di dalam hukum pidana diperlukan pembaharuan yang harus memerhatikan tentang formulasi peraturan atau pedoman dalam menerbitkan dan membatalkan sertifikat atau akta hak atas tanah.

Kata Kunci: direktori putusan hakim, pemalsuan Akta Authentic, tindak pidana pemalsuan akta pelepasan hak tanah.

ABSTRACT

The title of this thesis is "description of the settlement of criminal acts of forgery of land rights release deeds" problems in the study: Why did the District Court Judge and the Review Judge acquit the perpetrator in the case of forgery of the Land Rights Release Deed? What is the reason for the Cassation Judge to issue a criminal sentence against the perpetrator in the case of forgery of the Land Rights Release Deed? The author's purpose in researching the problem is to find out the reasons for the District Court Judge and the Review Judge to issue a criminal sentence against the defendant in the case of forgery of the Land Rights Release Deed and To find out the reasons for the Cassation Judge to issue a criminal sentence against the defendant in the case of forgery of the Land Rights Release Deed. The nature of the research used by the author in this study is descriptive, namely the author will explain completely, in detail, clearly and systematically about: The reasons for the District Court Judge to issue an acquittal The Supreme Court to issue a criminal sentence and the reasons for the Review Judge to overturn the Supreme Court's decision and issue an acquittal against the defendant in the case of forgery of the land rights release deed. The type of research conducted by the author is Normative Law research. According to Soerjono Soekanto, this research consists of research on legal principles, research on legal systematics, and research on the level of legal synchronization and the author's conclusion, Reasons of the District Court Judge: The defendant was not legally and convincingly proven guilty and did not meet the elements of the indictment. Reasons for the Review Judge. -The existence of a New situation (novum) in the form of a decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1250.K / Pid / 2014. The reason for the Cassation Judge to impose a criminal sentence because: The defendant's actions constitute a criminal act and the District Court Judge has applied the law incorrectly. The defendant's actions meet the elements of the indictment. The suggestions that can be conveyed from this author are as follows: It is hoped that outreach will be carried out in the form of education or learning to the public about the deed issuance process so that it does not cause losses and fraud on the basis of rights with existing evidence of deed ownership. For law enforcers, it is hoped that criminal law policies Regarding the criminal act of falsifying deeds of relinquishment of land rights in the future, reform is needed in the criminal law which must pay attention to the formulation of regulations or guidelines in issuing and canceling certificates or deeds of land rights.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Nimron dan Muhamad Iqbal, 2019. *Hukum Pembuktian*. Unpam Pres
- Andi hamsa. *Hukum acara pidana indonesia*. Jakarta sinar grafik, 2016.
- Arba H.M, 2019, “Hukum Agraria Indonesia” cetakan ke- 6, Jakarta, Sinar Grafika
- Annisa Setiva, “*Tindak Pidana Memasukan Keerangan Palsu Kedalam Akta Autentik*”
- Chazawi Adami/ Ferdian Ardi, 2016, “Tindak Pidana Pemalsuan”, jilid ke-2, KotaDepok : PT Rajagrafindo Persada,
- Maruar Sihaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*
- Soerjono Soekanto, dan, Sri Mamuji (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifin Pipin, 2008, “Hukum Pidana di Indonesia” cetakan ke- 2, Bandung :Pustaka Setia
- Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika
- Yanto M P.Ekon, (2019) *Hukum Acara Pidana, FH UKAW, Kupang*

Undang-Undang

- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal

Yogi Kristanto. *Tanggung Jawab Dan Wewenang Notaris/Ppat Terhadap Kekeliruan Dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 1, No. 2 – September 2020

Mario Rendi Lengkong “*Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Dalam Akta Perjanjian Yang Memberikan Keterangan Palsu*” .I Vol.5,No.4 (2017).

1Abdul Rahim, Muhammad Ibnu Fajar Rahim,”Pemalsuan surat dalam arti formildan materiil beserta akibat hukumnya”. Jurnal. Lldikti. Vol 10. No.2. tahun. 2021.

Dolly Happy Pradana, Rinitami Njatrijani, Suradi “Perlindungan Konsumen dalam kasus pemalsuan air zam- zam di Semarang (Tinjauan yuridis UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen)”, “Jurnal Diponegoro Law, Vol. 5, Nomor 3 tahun 2016,

Muhammad Helmi, *Pembelaan (Pledoi) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln*, June 2021, Volume 16 Nomor 1

Putusan

Putusan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN. Mdn.

Putusan Nomor 1270 K/Pid/2014.

Putusan Nomor 63 PK/Pid/2016.